

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bagijo, Himawan Estu. **Berbagai Catatan Atas Permasalahan Ketatanegaraan Republik Indonesia**. Jakarta: Unesa University Press. 2004.
- Chomzah, Ali Achmad. **Hukum Agraria (Pertanahan Di Indonesia) Jilid 1**. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2003.
- H.R, Ridwan. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana. 2010.
- Nurtjahjo, Hendra, dkk.. **Memahami Maladministrasi**. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia. 2013.
- Parlindungan, A.P. **Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak atas Tanah Menurut UUPA**. Bandung: Alumni. 1985.
- Sadjijono. **Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi**. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2011.
- Sahnan. **Hukum Agraria Indonesia**. Malang: Setara Press. 2014.
- Santoso, Urip. **Hukum Agraria Kajian Komprehensif**. Jakarta: Kencana. 2012.
- Santoso, Urip. **Perolehan Hak Atas Tanah**. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Santoso, Urip. **Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah**. Jakarta: Kencana. 2010.
- Soehadi, R. **Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria**. Surabaya: Karya Anda. 1980.
- Sutedi, Adrian. **Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya**. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Lembaran Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut L.N.R.I) Tahun 1960 No. 2 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut T.L.N.R.I) No. 1924.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, L.N.R.I Tahun 1960 No. 104 – T.L.N.R.I No. 2043.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UUPTUN”), L.N.R.I Tahun 1986 No. 77- T.L.N.R.I No. 3344.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004), L.N.R.I Tahun 2004 No. 35- T.L.N.R.I No. 4380.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. L.N.R.I Tahun 2008 No. 139 – T.L.N.R.I No 4899.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009), L.N.R.I Tahun 2009 No. 160 – T.L.N.R.I No 5079.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah L.N.R.I Tahun 1996 No. 58 – T.L.N.R.I No. 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah L.N.R.I Tahun 1997 No. 59 – T.L.N.R.I No. 3696.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut “PMA Penyelesaian Kasus Pertanahan”).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut “PerKepBPN PPPKP”).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut “PerKepBPN Kode Etik BPN”).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (selanjutnya disebut “PerKepBPN Organisasi dan Tata Kerja BPN”).

### C. Jurnal

Bambang Arwanto. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah.** Jurnal digital dari: e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/4857/pdf.  
Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Vol 31. No. 3. September 2016.

### D. Handout

Widjiastuti, Agustin. Handout **Hukum Administrasi** Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. 2015.

### E. Website

<https://x.detik.com/>  
<https://kompas.id/>  
<https://koran.tempo.co/>  
<http://megapolitan.kompas.com>  
<https://metro.tempo.co/>  
<https://news.detik.com>  
[www.law.cornell.edu](http://www.law.cornell.edu)